

Pengaruh Kepemimpinan dan *Value for Money* terhadap *Good Government Governance* Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung

Indra Firmansyah¹, Prima Destiani Rahmawati²

Prodi D4 Akuntansi Politeknik Pos Indonesia¹

Email : indrafirmansyah@poltekpos.ac.id

Prodi D4 Akuntansi Politeknik Pos Indonesia²

Email : primadestiani@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan merupakan suatu faktor utama untuk mencapai tujuan dalam organisasi yang dipimpinnya. Sedangkan *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penerapan karakteristik *good government governance* pada dasarnya merupakan perwujudan keamanan pengelolaan dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. karakteristik *good government governance* yaitu partisipasi, aturan hukum, transparan, respon, orientasi konsensus, keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan *value for money* terhadap *Good Government Governance* secara parsial dan hubungan dengan tiap variable yang terkait.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien jalur diketahui bahwa kepemimpinan memiliki koefisien jalur sebesar 0,616 dan *value for money* memiliki koefisien jalur sebesar 0,186, korelasi berganda diperoleh sebesar 0,705 yang dikategorikan kuat karena berada diantara 0,60–0,799. Hasil koefisien determinasi diperoleh sebesar 57,5%. Sedangkan hasil uji f dapat dilihat f_{hitung} sebesar 43,271 dan f_{tabel} 3,14 yang berarti $f_{hitung} > f_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,000.

Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa variabel kepemimpinan dan *value for money* secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap *good government governance* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.

Kata Kunci : *Kepemimpinan, Value for Money, Good Government Governance*

Abstract

Leadership is a major factor to achieve the objectives of the organization he leads. While the value for money is the concept of the management of public sector organizations based on three main elements, economy, efficiency and effectiveness. In achieving good governance, clean and dignified, professional and responsible embodied by the figure and the bureaucracy more efficient and effective and can provide excellent service to the entire community. Application of the characteristics of good government governance is essentially a manifestation manager in performing the tasks mandated to him and honesty in financial reporting. characteristics of good government governance: participation, rule of law, transparency, response, consensus orientation, equity, effective and efficiency, accountability and strategic vision.

The purpose of this study is to determine the effect of leadership and Value for money on Good Government Governance partially and the relationship with each related variable.

Based on the results of the calculation of the path coefficient is known that the leadership has the path coefficient of 0.616 and the value for money had a path coefficient of 0.186, obtained multiple correlation of 0.705 is considered strong because in between 0.60 to 0.799. Results obtained determination coefficient of 57.5%. While the test results can be seen F arithmetic 43.271 and F table 3.14, which means F arithmetic $>$ f table with significance 0,000 level.

From the above conclusion it can be said that the leadership variable and value for money simultaneously significant positive effect on good government governance in Regional Development Planning Board (BAPPEDA) in Bandung.

Keywords: *Leadership, Value for Money, Good Government Governance*

I. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya era globalisasi maupun reformasi, terdapat tuntutan untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih berorientasi pada terwujudnya kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan disektor publik berpengaruh besar atas kemajuan Indonesia. Kepemimpinan yang profesional dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan karyawan/bawahan dalam menjalankan perintah atasan yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Kepemimpinan yang baik dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan *good government governance* yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 1 point 2 menyatakan bahwa

“penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya” dan pasal 5 point 6 menyatakan bahwa “melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Good government governance diterapkan untuk berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan pemerintahan dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *good government governance* mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membebankan semua biaya yang patut kepada masyarakat luas, dengan demikian perlu adanya penerapan prinsip-prinsip *good government governance*.

Berdasarkan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Endang Kuswoyo 2014 Analisis Value for Money dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik pada Koni Provinsi Bengkulu (Studi Kasus pada Program Upaya Pembinaan Atlet) memberikan gambaran perlunya value for money untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah sebagai dasar dan alat ukurnya.

BAPPEDA sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi BAPPEDA diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra BAPPEDA tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Bandung 2014-2018.

Kepemimpinan dengan konsep *value for money* merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tatakelola yang baik (*good governance*) yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Perlunya reformasi di sektor publik untuk mewujudkan *good public* dan *corporate governance* dalam rangkaian menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik. Hal ini juga bisa diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosalinda Cahya Hutahuruk. 2009. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai dijelaskan disana bahwa factor kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap penilaian,kinerja pegawainya

Berdasarkan fenomena dan study empiris yang dilakukan penelitian terdahulu makja penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Value for Money terhadap Good Government Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan Value for money terhadap Good Government Governance secara parsial dan hubungan dengan tiap variable yang tewrkait hjpga sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses *untuk mempengaruhi orang lain* baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Proses memengaruhi tersebut sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas maupun bujukan.

“Transisi dalam teori kepemimpinan berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan keingintahuan para ilmuwan dan peneliti. Mula-mula kepemimpinan itu dilihat dari sudut pandang sifat, ciri atau bakat yang dibawa sejak lahir. Ketidakpuasan akan hasil dari pendekatan ciri tersebut melahirkan pendekatan kepemimpinan berdasarkan perilaku. Kedua pendekatan tersebut belum memuaskan para peneliti sehingga menggunakan pendekatan lain, yaitu keberhasilan seseorang tergantung pada situasinya. Bahkan perkembangan terakhir pendekatan kembali ke ciri-ciri seorang pemimpin” (Rivai dalam Mulyadi, 2016:23).

Tugas Kepemimpinan

Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Menurut Keating yang dalam buku Harbani Pasolong (2015:5) mengatakan bahwa “tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu:

1. Memulai (*initiating*) yaitu usaha agar kelompok mulai kegiatan atau gerakan tertentu,
2. Mengatur (*regulating*) yaitu tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok,
3. Memberitahu (*informating*) yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat para anggota dan meminta dari mereka informasi, data, fakta, pendapat yang diperlukan,
4. Mendukung (*supporting*) yaitu usaha untuk menerima gagasan, pendapat, usul dari bawah dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama, dan
5. Menilai (*evaluating*) yaitu tinfakan untuk menguji gagasan yang muncul, menyingkat lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut”.

Fungsi Kepemimpinan

Stoner dalam Pasolong (2010:22) menyatakan bahwa “fungsi kepemimpinan adalah seorang beroperasi secara efektif kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan dua hal fungsi yaitu berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah dan memelihara kelompok atau sosial, yaitu tindakan seperti menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa individu merasa dihargai oleh kelompok”.

Fungsi kepemimpinan menurut Siagan (2010:48-70) yaitu :

1. “Pimpinan sebagai penentu arah,
2. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara birokrasi,
3. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif,
4. Pimpinan sebagai mediator, dan
5. Pimpinan selaku integrator.”

B. Value for Money

Menurut Abdul Halim (2012:132) “konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. *value for money* juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang.”

Pengukuran Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018:130) bahwa “kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, maka diperlukan

indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kualitas terkait dengan kesesuaian dengan maksud dan tujuan, konsistensi, dan kepuasan publik. Kepuasan masyarakat dalam konteks tersebut dapat dikaitkan dengan semakin rendahnya *complaint* dari masyarakat.”

Adapun langkah-langkah pengukuran *value for money* menurut Mardiasmo (2018:133), yaitu :

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Pengukuran *Outcome*

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *outcome* lebih tinggi nilainya dari *output*, karena hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan.

C. Good Government Governance

Teori Good Government Governance

Pemerintahan atau “*government*” yang berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya. Atau lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Sedangkan dalam pemerintahan atau “*governance*” yaitu *the act, fact, manner of governing*. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu tindakan, fakta, pola, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian *governance* adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Koiman (1993:87) bahwa “*governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.” Sedangkan menurut Sedarmayanti (2012:2) “istilah *Governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pembinaan penyelenggaraan dan juga bisa diartikan pemerintahan.”

Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*.

Unsur-unsur Good Government Governance

Menurut Sedarmayanti (2012:4) pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Negara/pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar.

3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Manfaat *Good Government Governance*

Menurut Sedarmayanti (2012:5) manfaat *good government governance* dalam disebutkan :

- 1) Dengan terselenggaranya *good governance* adalah sebagai persyaratan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita- cita bangsa dan negara.
- 2) Terciptanya pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *good government governance* yaitu proses tata kelola pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa untuk menjadikan pemerintahan yang baik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang Digunakan

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri kepemimpinan, *value for money* dan *good government governance*. Sifat penelitian verifikatif adalah untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini akan menguji pengaruh kepemimpinan dan *value for money* terhadap *good government governance* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif.

Mengingat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah *descriptive survey* dan *metode explanatory survey*. *Descriptive survey* adalah metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kepemimpinan, *value for money* dan *good government governance*. *Metode explanatory survey* adalah metode penelitian yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada pegawai BAPPEDA Kota Bandung.

Metode Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan *proporsional stratified random sampling*, yaitu teknik ini digunakan untuk mengambil sampel dengan memperhatikan starata (tingkatan) di dalam populasi. Dalam teknik ini data sebelumnya dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Masing-masing sub diusahakan homogen. Dari masing-masing sub selanjutnya diambil sebagaian anggota secara acak dengan komposisi prorsional/disproporsional.

Populasi Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai BAPPEDA Kota Bandung yang terdiri dari golongan II, golongan III, dan golongan IV yang dikelompokkan dalam 2 jenis kategori yakni laki-laki dan perempuan komposisi pegawai BAPPEDA Kota Bandung per tahun 2015 disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Bandung

No	Golongan	Jumlah Pegawai		Total	Presentase (%)
		Laki- laki	Perempuan		
1.	II	5	-	5	6 %
2.	III	44	26	70	79%
3.	IV	11	3	14	15%
Jumlah		60	29	89	100%

Sumber : BAPPEDA Kota Bandung (2015)

Populasi adalah kumpulan dari unit sampling yang meliputi satu atau lebih unit unsur (Sekaran, 2013:10). Dari Tabel 3.2 di atas, maka jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 89 orang pegawai.

Sampel Penelitian

Sampel yang menjadi sasaran penelitian adalah unsur-unsur yang berada dalam populasi. Teknik sampling yang dipilih adalah *proporsional stratified random sampling methode*. Teknik sampling ini digunakan untuk pengambilan sample dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Sampling ini dilakukan apabila populasi heterogen (tidak sejenis). Teknik ini dilakukan dengan membuat cara lapisan-lapisan (strata), kemudian dari setiap lapisan diambil sejumlah subjek secara acak. Jumlah subjek dari setiap lapisan (strata) adalah sampel. (Sugiono, 2015:120). Sebelum pemilihan sampel dilakukan di lapangan maka terlebih dahulu peneliti menentukan kerangka sampel (sampel frame), maka dengan pertimbangan; **pertama**, variabel yang akan diteliti keadaannya relatif homogen, dan **kedua**, karena setiap satuan sampel dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama (Harun Al-Rasyid, 2005) alasan **ketiga** karena adanya kendala atau keterbatasan sumber daya antara lain waktu dan biaya, **keempat** karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2015). Dalam pengumpulan data dilakukan melalui kuisisioner yang disebarakan kepada para responden sebagai variabel yang akan diteliti yaitu pegawai BAPPEDA Kota Bandung.

Penentuan jumlah sampel pada populasi adalah secara *Stratified random sampling methode*, sebagai berikut:

Tabel 2. Sampel Penelitian

Golongan	Jumlah pegawai		Total	Persentase Responden(%)
	Laki-laki	Perempuan		
II	4	-	4	6 %
III	33	20	53	79%
IV	8	2	10	15%
Jumlah	45	22	67	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2016

Uji Hipotesis

Untuk menguji koefisien jalur, terlebih dahulu harus menterjemahkan hipotesis penelitian ke dalam hipotesis statistik sebagai berikut :

Hipotesis : **Menguji sub struktur 1, yaitu variabel kepemimpinan, *value for money* terhadap *good government governance*, sebagai berikut:**

a. Rumus hipotesis operasional secara parsial (ρ_{YX1})

H_0 : $\rho_{YX1} = 0$ Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap *good government governance*

H_1 : $\rho_{YX1} \neq 0$ Terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap *good government governance*

Kriteria uji

Tolak H_0 jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

Terima H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

b. Rumus hipotesis operasional secara parsial (ρ_{YX2})

H_0 : $\rho_{YX2} = 0$ Tidak terdapat pengaruh *value for money* terhadap *good government governance*

H_1 : $\rho_{YX2} \neq 0$ Terdapat pengaruh *value for money* terhadap *good government governance*

Kriteria uji

Tolak H_0 jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

Terima H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

c. Rumus hipotesis operasional secara simultan (ρ_{YX_1, X_2})

$H_0 : \rho_{YX_1, X_2} = 0$

Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan dan *value for money* terhadap *good government governance*

$H_1 : \rho_{YX_1, X_2} \neq 0$

Terdapat pengaruh kepemimpinan dan *value for money* terhadap *good government governance*

Kriteria uji

Tolak H_0 jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

HASIL PENELITIAN

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Skor	R Kritis	Kategori
1.	Kepemimpinan (X_1)	0,710	0,700	Reliabel
2.	<i>Value for Money</i> (X_2)	0,711	0,700	Reliabel
3.	<i>Good Government Governance</i> (X_3)	0,706	0,700	Reliabel

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalisasi Alat Ukur One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kepemimpinan	VFM	GGG
N		67	67	67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	56,37	37,2687	74,9552
	Std. Deviation	3,915	2,76659	4,76869
Most Extreme Differences	Absolute	,106	,107	,092
	Positive	,075	,107	,073
	Negative	-,106	-,097	-,092
Kolmogorov-Smirnov Z		,871	,879	,755
Asymp. Sig. (2-tailed)		,433	,423	,618

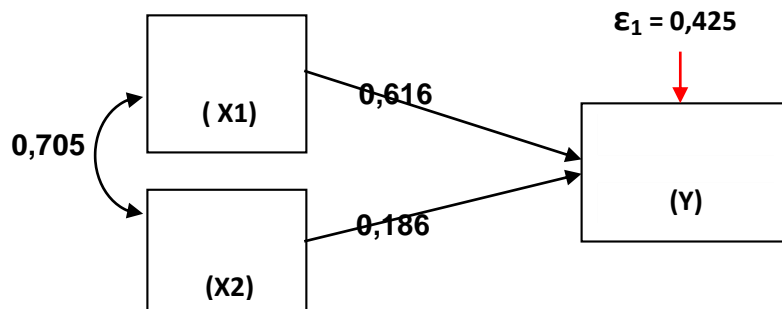
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

$H_0 : p\text{-value} \leq 0,05$ Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

$H_1 : p\text{-value} > 0,05$ Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Data pada tabel diatas. Menunjukkan bahwa semua data variabel, yang terdiri dari variabel kepemimpinan, *value for money*, dan *good government governance* mengikuti sebaran data normal dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smimov maupun Shapiro-Wilk dengan menunjukkan nilai *p-value* > 0,05, sehingga menerima H_1 dan menolak H_0 dengan demikian sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.



Gambar 1. Persamaan Jalur

Berdasarkan Gambar 1. maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut;

Dimana :

Y = *Good government governance*

X₁ = *Kepemimpinan*

X₂ = *Value for money*

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total Pengaruh
		X ₁	X ₂	
Kepemimpinan	37,95%	-	8,08%	46,02%
<i>Value for Money</i>	3,46%	8,08%	-	11,54%
Total Pengaruh X Ke Y				57,56%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa variabel kepemimpinan (X₁) mempunyai pengaruh langsung sebesar 37,95% dan pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan *value for money* (X₂) sebesar 8,08% sehingga total pengaruhnya sebesar 46,02%

Variabel *value for money* (X₂) mempunyai pengaruh langsung sebesar 3,46% dan pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan kepemimpinan (X₁) sebesar 8,08%, sehingga total pengaruhnya sebesar 11,54%.

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) yang dinyatakan dalam persentase menggambarkan besarnya kontribusi semua variabel bebas yaitu kepemimpinan (X₁) dan *value for money* (X₂) dalam menentukan variasi *good government governance* (Y) adalah sebesar **57,56%**.

Uji Hipotesis

Berdasarkan pengolahan data, kita melihat bahwa terdapat tiga substruktur sehingga pembahasan interpretasi hasil harus dilakukan bertahap berdasarkan substruktur tersebut. Berikut penjelasan dari masing-masing substruktur :

a. Uji Parsial Variabel Kepemimpinan (X₁) Terhadap *Good Government Governance* (Y)

Pengaruh parsial variabel kepemimpinan (X₁) terhadap *good government governance* (Y) perlu dilakukan pengujian statistik, maka mengujinya menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut :

$$H_0 : \rho_{YX_1} = 0$$

Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap *good government governance*.

$H_1: \rho_{YX_1} \neq 0$ Terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap *good government governance*.

Tabel 5. Pengujian Parsial Variabel Kepemimpinan (X_1) Terhadap *Good Government Governance* (Y)

Struktural	Koefisien jalur	t –hitung	t- tabel	P-value	Kesimpulan
$\rho_{Y X_1}$	0,747	9,051	1,99	0,000	H_0 di tolak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara X_1 terhadap Y

Sumber : Data diolah 2016

Untuk koefisien jalur $X_1 = 0,747$, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,051 dengan mengambil taraf signifikansi α sebesar 5%, maka nilai $t_{tabel} = 1,99$, sehingga dikarenakan $t_{hitung} = 9,051$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,99$, maka H_0 ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan (X_1) terhadap *good government governance* (Y).

b. Uji Parsial Variabel *Value for Money* (X_2) terhadap *Good Government Governance* (Y)

Pengaruh parsial variabel *value for money* (X_2) terhadap *good government governance* (Y) perlu dilakukan pengujian statistik, maka mengujinya menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0 : \rho_{YX_2} = 0$ Tidak terdapat pengaruh *value for money* terhadap *good government governance*.

$H_1: \rho_{YX_2} \neq 0$ Terdapat pengaruh *value for money* terhadap *good government governance*

Tabel 6. Pengujian Parsial Variabel *Value for Money* (X_2) terhadap *Good Government Governance* (Y)

Struktural	Koefisien jalur	t –hitung	t- tabel	P-value	Kesimpulan
ρ_{YX_2}	0,620	6,370	1,99	0,002	H_0 di tolak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara X_2 terhadap Y

Sumber : Data diolah 2016

Untuk koefisien jalur $X_2 = 0,620$, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,370 dengan mengambil taraf signifikansi α sebesar 5%, maka nilai $t_{tabel} = 1,98$, sehingga dikarenakan $t_{hitung} = 6,370$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,98$, maka H_0 ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara *value for money* (X_2) terhadap *good government governance* (Y).

c. Uji Simultan Variabel Kepemimpinan (X_1) dan *Value for Money* (X_2), terhadap Variabel *Good Government Governance* (Y)

Pengaruh secara simultan variabel kepemimpinan dan *value for money* terhadap *good government governance* menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut :

$H_0: \rho_{Y X_1} = \rho_{YX_2} = 0$ Tidak terdapat pengaruh variabel kepemimpinan dan *value for money* terhadap *good government governance*.

$$H_1 : \rho_{YX_1} \neq \rho_{YX_2} \neq 0$$

Terdapat pengaruh variabel kepemimpinan dan *value for money* terhadap *good government governance*.

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang kuat secara simultan/bersamaan antara X_1 (kepemimpinan) dan X_2 (*value for money*) terhadap Y (*good government governance*), maka dapat dilihat dari hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Simultan Variabel Kepemimpinan (X_1) dan *Value for Money* (X_2) terhadap *Good Governance* (Y)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	862,805	2	431,402	43,271	,000 ^b
Residual	638,061	64	9,970		
Total	1500,866	66			

a. Dependent Variable: GGG

b. Predictors: (Constant), VFM, Kepemimpinan

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 43,271 dimana kriteria penolakan H_0 jika F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} atau $F_0 > F_{tabel}$, dengan derajat bebas $V_1 = 2$ dan $V_2 = 67-3$ dan tingkat kepercayaan 95%, maka dari tabel distribusi F didapat nilai $F_{tabel} = 3,14$. Karena 43,271 lebih besar dari 3,14, maka H_0 ditolak, artinya bahwa terdapat hubungan secara linear antara X_1 (kepemimpinan) dan X_2 (*value for money*) terhadap Y (*good government governance*), atau terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan (bersama-sama) X_1 (kepemimpinan) dan X_2 (*value for money*) terhadap Y (*good government governance*).

IV. Pembahasan

Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian secara empiris, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, melalui penyebaran kuisioner pada pegawai BAPPEDA yang menjadi responden dan hasil analisis deskriptif dari jawaban responden, serta dengan melihat keterkaitan antara teori-teori yang berlaku dan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, maka diperlukan pembahasan analisis deskriptif sebagai berikut:

Pembahasan Hubungan Kepemimpinan dan *Value for Money*

Berdasarkan hasil pengelolaan data, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kepemimpinan (X_1) dengan *value for money* (X_2) mempunyai tingkat hubungan yang kuat dan searah karena nilainya positif dengan nilai r korelasinya yaitu 0,705.

Pernyataan diatas dapat diartikan apabila kepemimpinan (X_1) naik sebesar satu satuan, maka diikuti dengan kenaikan besaran *value for money* (X_2) sebesar 0,705 satuan. Menurut Abdul Halim (2012:132) *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep *value for money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Kepemimpinan adalah inti dari pada manajemen membentuk organisasi yang baik. Efisiensi dan

produktivitas yang tinggi dapat dicapai bila pemimpin berperan secara efektif dalam mengkoordinasikan semua bawahan di lingkungannya.

Pembahasan Hasil Analisis Verifikatif

Secara keseluruhan hasil hipotesis diatas telah memberikan hasil uji hipotesis yang dapat diterima, maka untuk memperkuat hasil penelitian tersebut dibahas kembali dan divalidasi dengan konsep dan teori. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan, *value for money* berpengaruh signifikan terhadap *good government governance*.

1. Pengaruh Kepemimpinan terhadap *Good Government Governance* secara parsial

Berdasarkan pengolahan data, terlihat bahwa variabel kepemimpinan (X_1) mempunyai pengaruh langsung sebesar 37,95% dan pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan *value for money* (X_2) sebesar 8,08%, sehingga total pengaruhnya adalah sebesar **46,02%**.

Kepemimpinan memiliki kontribusi yang paling dominan terhadap *good government governance*, semakin tinggi peran kepemimpinan maka akan meningkatkan *good government governance*. Pemimpin memiliki peranan penting dalam memajukan instansinya. Salah satu upaya pemimpin dalam memajukan instansi agar dapat menciptakan *good government governance* yaitu dengan pemimpin memberikan kesempatan kepada seluruh anggota dalam rangka meningkatkan kemampuannya baik melalui seminar, pelatihan dan lain-lain.

Untuk menciptakan pemerintah yang dapat mengelola pemerintah secara baik (*good government governance*), seorang kepala daerah/pemimpin perlu mempertimbangkan kesejahteraan pegawai. Hal ini sangat penting untuk organisasi pemerintahan yang baik hanya akan terbentuk jika dijalankan oleh orang-orang yang baik.

2. Pengaruh *Value for Money* terhadap *Good Government Governance* secara parsial

Berdasarkan pengolahan data, terlihat bahwa variabel *value for money* (X_2) mempunyai pengaruh langsung sebesar 3,46% dan pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan kepemimpinan (X_1) sebesar 8,08%, sehingga total pengaruhnya sebesar **11,54%**.

Value for money mempunyai hubungan yang signifikan dengan *good government governance*. Semakin baik *value for money* suatu instansi, maka akan semakin baik pula *good government governance*. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*). Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur *output*, karena *output* yang dihasilkan tidak selalu berupa *output* yang tidak berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*. (Mardiasmo 2018:187)

Value for money terdapat pengaruh terhadap *good government governance* mempunyai hubungan yang erat. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang tidak berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (*good government governance*). Untuk mewujudkan *good government governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good government governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik.

3. Pengaruh Kepemimpinan dan *Value for Money* terhadap *Good Government Governance* secara simultan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa total pengaruh variabel kepemimpinan (X_1) dan *value for money* (X_2) secara langsung dan tidak langsung terhadap *good government governance* (Y) sebesar 57,5%, dimana angka tersebut sama dengan hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya kontribusi variabel bebas yaitu kepemimpinan (X_1) dan *value for money* (X_2) dalam menentukan variasi *good government governance* (Y) adalah sebesar 57,5%, sedangkan sisanya sebesar 42,5% merupakan variabel lain yang mempengaruhi variabel *good government governance* yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dalam mewujudkan *good government governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik yaitu reformasi sistem penganggaran, sistem akuntansi, sistem pemeriksaan, sistem manajemen keuangan daerah, dimana reformasi tersebut dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* (Mardiasmo, 2018:20). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Tata kelola yang baik akan terwujud jika dalam pemerintahan akan dikelola oleh pemimpin yang bertanggungjawab dan melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Untuk menciptakan pemerintah yang dapat mengelola pemerintah secara baik (*good government governance*), seorang kepala daerah/pemimpin perlu mempertimbangkan kesejahteraan pegawai. Hal ini sangat penting untuk organisasi pemerintahan yang baik hanya akan terbentuk jika dijalankan oleh orang-orang yang baik.

Berdasarkan hasil uji pengaruh kepemimpinan dan *value for money* terhadap *good government governance* secara simultan dengan menggunakan uji F atau ANOVA yang telah dihitung diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 43,271 dan nilai F_{tabel} adalah sebesar 3,14 yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara linear antara X_1 (kepemimpinan) dan X_2 (*value for money*) terhadap *good government governance* (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat nilai kepemimpinan dan *value for money* maka semakin tinggi tingkat pencapaian *good government governance* pada BAPPEDA Kota Bandung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis gambaran kepemimpinan di BAPPEDA Kota Bandung berada pada kategori baik, namun masih terdapat aspek yang lemah yaitu kemampuan pemimpin dalam mengatur sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Gambaran *Value for money* di BAPPEDA Kota Bandung berada pada kategori yang baik, namun masih terdapat aspek lemah yaitu melakukan pembelanjaan dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik dan nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan pembuatan RAPB telah disesuaikan dan disetujui oleh pemimpin perlu dilaksanakan sesuai dengan aturan. Sedangkan untuk gambaran *good government governance* di BAPPEDA Kota Bandung berada pada kategori yang baik, namun masih ada aspek yang rendah yaitu menghubungkan antara pencapaian kinerja suatu program/ kegiatan dengan tujuan strategis visi misi. Selain itu, aspek terendah kedua yaitu pada pernyataan Belanja yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Hubungan kepemimpinan dan *value for money* di BAPPEDA Kota Bandung mempunyai hubungan yang sangat kuat dan searah karena nilainya positif. Artinya bahwa jika kepemimpinan naik sebesar satu satuan maka diikuti dengan kenaikan besaran *value for money* sebesar 0,705 satuan.

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan baik secara langsung maupun tidak langsung dari variabel kepemimpinan dan *value for money* terhadap *good government governance* di BAPPEDA Kota Bandung, dimana variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel Kepemimpinan (X_1). Artinya bahwa semakin tinggi tingkat nilai kepemimpinan dan *value for money* maka semakin tinggi tingkat pencapaian *good government governance* pada BAPPEDA Kota Bandung.

B. Saran-saran

Saran Akademis

Dalam rangka meningkatkan pengembangan keilmuan dan manfaat bagi penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan sumber informasi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau penelitian lanjut yang terkait dengan penelitian ini.
2. Perlu dilakukan kajian penelitian dengan ruang lingkup yang lebih mendalam dengan penambahan beberapa variabel independen dan variabel dependen lainnya termasuk dengan menambahkan beberapa dimensi dan indikatornya.
3. Dalam penelitian lanjut perlu dipertimbangkan dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas dan jumlah sampel yang lebih banyak dengan menggunakan alat analisis yang berbeda.

Saran Praktis

1. Dalam rangka meningkatkan kepemimpinan, *value for money* dan *good government governance* di BAPPEDA Kota Bandung.
 - a. Dalam rangka meningkatkan kepemimpinan di BAPPEDA Kota Bandung perlu adanya peningkatan kemampuan pemimpin dalam mengatur sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
 - b. Dalam upaya meningkatkan *value for money*, perlu adanya upaya dari pemimpin untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang mendasar pada konsep *value for money*, maka memerlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik dengan ekonomi, efisiensi, dan efektif.
 - c. Dalam rangka peningkatan *good government governance* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah perlu program kerja harus disesuaikan dengan tujuan strategis visi misi. Tata kelola yang baik akan terwujud jika dalam pemerintahan akan dikelola oleh pemimpin yang bertanggungjawab dan melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- A, Affandi. 2012. *Peran Knowledge Management dalam Menciptakan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan Pada Intsansi Pendidikan tinggi Ilmiah*. Bandung:UNPAS
- Abdul, Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Ancok, Djamaludin, 2010. *Tehnik Skala Penyusunan Pengukur*. Pusat penelitian kependudukan. UGM :Yogyakarta
- Harun, Al-Rasyid. 2008. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate denan program IBM SPSS 19*. Semarng: Universitas Diponegoro
- Indriantoro. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit DPFE
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Irawan. 2010. *Metode Peneltian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- J. Supranto. 2008. *Statistik Teori & Aplikasi, Cetakan Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Kaloh. 2010. *Kepemimpinan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Keating, J, Charles. 2015. *Kepemimpinan : Teori dan Pengembangannya*. Kanisius: Yogyakarta

- Kusnendi dan Hendar. 2010. *Ekonomi Koprasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi UI
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi
- Mohamad, Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Mulyasa. 2013. *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. 2016. *Akuntansi Manajemen: Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, Hadari. 2009. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada Univercity Press
- Nazir. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Paslong, Harbani. 2015. *Kepemimpinan Birokrasi*. Makassar: Alfabeta
- Rivai, Veithzal, dkk . 2016. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Cetakan kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- , 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Sekaran. 2013. *Research Methods For Business : A Skill Building Aproach, 3rd edition*. New York : John Wiley and Sons, Inc
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika Omset
- Sitepu. 2005. *Analisis Jalur (Path Analysis) unit pelayanan Statistika Jurusan Statistika*. Bandung:FMP IPA UNPAD
- Sudjana. 2009. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- , 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- , 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- , 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung:Penerbit Alfabeta
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Penerbit Alfabeta
- , 2000. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta
- , 2010. *Metodelogi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sutisna, Oteng. 2006. *Studi Pengembangan Pendidikan Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa
- Siagan, S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Pesada
- Undang-Undang**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*
- Undang-undang Nomor 108 Tahun 2000. *Pertanggungjawaban Kepala Daerah*
- Kelompok Penelitian**
- Endang Kuswoyo. 2014. *Analisis Value for Money dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik pada Koni Provinsi Bengkulu (Studi Kasus pada Program Upaya Pembinaan Atlet)*
- Gustati & Ferdawati. 2009. *Sinergitas Good Governance, Demokrasi, dan Reinventing Government dalam Mensejahterakan Masyarakat*
- Miswaty. 2013. *Analisis Pengaruh Penerapan Good Governance dan pengendalian Internal Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Pemerintahan Kota Balikpapan*
- Nurfaisal. 2003. *Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kepuasan Kerja Dengan Displin Kerja Guru*.
- Rosalinda Cahya Hutahuruk. 2009. *Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai*
- Stephan Gerhard Huber (2004). *School Leadership and Leadership Development*
- Tri Siwi Nugrahani. 2007. *Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*